

ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan di negara Indonesia. Terdapat beberapa pajak yang dapat dikenakan terhadap developer maupun bangunan itu sendiri. Potensi pajak properti di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari perkembangan bisnis properti di Indonesia yang sangat meningkat secara tajam yang dikerjakan oleh banyak developer. Dalam transaksi jual-beli terdapat beberapa pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan harga transaksi. Tetapi banyak wajib pajak atau developer yang nakal dalam melakukan pembayaran. Dimana mengurangi jumlah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, dengan menggunakan nilai jual objek pajak yang jumlahnya jauh dibawah harga transaksi. Masalah tersebut jelas mengurangi pendapatan negara yang berakibat pada kerugian negara. Dengan anggaran pendapatan negara, maka suatu negara dapat mensejahterkan rakyatnya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu kecurangan seperti itu dapat terjadi, karena adanya pihak terkait yang dapat membantu kecurangan tersebut. Pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan proses perpajakan adalah wajib pajak, fiskus, dan notaris. Pihak tersebut memiliki tugas masing-masing yang berpengaruh dalam proses penghitungan pembayaran pajak.

Kata Kunci: penegakan hukum ; pajak ; properti.